

## Setttt... Anggota OJK Dilarang Terima Batu Akik Bacan

📅 Selasa, 12 Mei 2015 12:40:58  
Reporter : Renni Susilawati



---

Anggota OJK Tak Boleh Terima Batu Akik Bacan

**Bali (beritajatim.com (undefined))**- Indonesia masih lekat dengan sejarah korupsi 100 besar tertinggi di dunia. Bahkan tahun 2013 lalu Indonesia tercatat diposisi ke 64 negara terkorup di dunia. Dan diakhir tahun 2014 lalu dari versi Transparency International, Indonesia masuk dalam 175 besar negara terkorup di dunia.

José Ugaz, Ketua Transparency International, melalui situs resminya mengaku jika korupsi yang terjadi di 175 ini telah merusak pertumbuhan

ekonomi dan upaya untuk menghentikan korupsi semakin lemah.

"Apalagi ,ketika para pemimpin dan pejabat tinggi menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadinya," ucap José.

Hal yang sama juga diamini oleh The Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Indonesia, Pramono Anung mengatakan Indonesia masih harus berjuang mencegah dan memberantas korupsi.

"Korupsi sudah jadi masalah serius bagi Indonesia. Sebab pelakunya tak hanya kalangan eksekutif atau pejabat pemerintahan tetapi juga legislatif, yudikatif bahkan swasta," aku Pramono yang juga politisi senior Indonesia itu.

Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyebutkan angka korupsi naik 12 persen tiap tahunnya, meskipun sanksi terhadap pelaku korupsi sudah semakin berat dan pengawasan terhadap jabatan juga sudah ketat.

"Dari laporan kepolisian dan KPK, tercatat 629 kasus korupsi dengan berbagai jenis seperti suap, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan dana serta pemalsuan data. Dari semua jenis kasus korupsi itu sudah ada sekitar 1300 orang yang telah ditetapkan tersangka," beber Ade Irawan, dari ICW.

Seolah sadar bahwa besarnya kekuasaan tim pengawas lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas lembaga keuangan di Indonesia membuat Dewan Audit OJK harus semakin ketat dalam mengawasi gerak gerik tim pengawasnya sendiri. Bahkan Ilya Avianti, Ketua Dewan Audit OJK, melarang semua anggota OJK menerima perhiasan seperti batu akik yang nilainya saat ini selangit.

"Pengawas dan pegawai OJK tak boleh menerima gratifikasi, kalau hadiah pesta pernikahan pegawai bahkan petinggi OJK hanya boleh Rp 2 juta, jika ada lembaga keuangan maupun personal yang memberi lebih harus lapor ke kami. Dan yang paling perlu disikapi adalah pemberian hadiah perhiasan seperti permata, batu akik bacan jelas tak boleh diterima karena nilainya tak terukur," jelas Ilya Avianti, yang juga anggota Dewan Komisioner bidang Audit Internal Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas OJK, saat Pendidikan Jurnalistik Keuangan OJK di Bali, Selasa (12/5/2015).

Untuk menegur bahkan memberikan sanksi kepada auditor pengawas perbankan, asuransi, pasar modal bahkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) serta lembaga keuangan lainnya yang melakukan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, penipuan, penggelapan aset, kecurangan, hingga perbuatan melanggar hukum, OJK kembali menggalakkan Whistle Blowing System (WBS) meskipun OJK sudah memiliki WBS sebelumnya.

WBS ini merupakan sistem pelaporan dugaan pelanggaran yang dilakukan pegawai OJK yang bisa dilaporkan oleh masyarakat. Masyarakat atau pegawai lembaga keuangan di Indonesia yang menemukan adanya aksi main mata antara tim auditor pengawas maupun pejabat OJK dengan lembaga keuangan bisa melaporkannya via online ke situs [www.ojk.go.id/bws](http://www.ojk.go.id/bws) (<http://www.ojk.go.id/bws>) atau hotline 021-1500850.

"Kami menjamin keamanan dan rahasia pelapor hingga akhir hayatnya jika pelapor tak menginginkan identitasnya disebut. Tetapi kami akan memberikan reward bagi pelapor yang mau mengungkap pelanggaran anggota kami secara terbuka," tegas Ilya.

Dikatakan sejak diluncurkan situs OJK Whistle Blowing System (WBS) diluncurkan kembali pada 31 Maret 2015 lalu, OJK sudah menerima 10 pelaporan pejabat OJK yang diduga nakal. 10 laporan itu saat ini sudah melalui proses penyidikan dari tim audit OJK.

"Tahun ini bagi kami adalah tahun penguatan integritas OJK dimana ada 3 pekerjaan besar yang harus kami lakukan tahun ini. Diantaranya adalah mengendalikan pemberian gratifikasi, mengoptimalkan fungsi anti kecurangan (fraud) OJK serta melakukan revitalisasi WBS," jelasnya.

Gratifikasi bagi OJK merupakan momok paling menakutkan sebab gratifikasi bisa menjadi pintu masuk aksi korup. Sebagai langkah pencegahannya OJK akan memantau setiap lifestyle petugasnya yang mencurigakan hingga menyidikinya serta membongkar alur penerimaan uangnya dengan melihat rekening banknya.

"Ini kami lakukan karena OJK ingin jadi rule model lembaga pemerintahan yang bersih dan sangat menjunjung tinggi kejujuran dan kepentingan masyarakat," tandasnya.[rea]